

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MODERN DI YOGYAKARTA MASA KOLONIAL BELANDA PADA TAHUN 1900-1942**UMI LATIFA**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: umilatifa64@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Terjadinya pengaruh Barat ke Indonesia khususnya di Yogyakarta telah membawa pengaruh terhadap Yogyakarta terutama bidang pendidikan secara langsung telah menjadi pendorong berkembangnya pendidikan ala Barat di Yogyakarta pada tahun 1900-1942. Oleh karena itu, pentingnya menjelaskan latar belakang, perkembangan serta dampak pendidikan Barat di Yogyakarta pada tahun 1900-1942. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi/penafsiran, dan historiografi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa latar belakang berdirinya pendidikan modern ala kolonial belanda demi kepentingan perusahaan merupakan bentuk strategi pemerintah Belanda dalam menyelenggarakan perkebunan, pertanian, pertambangan. Dikarenakan pemerintah Belanda memerlukan tenaga-tenaga bumiputera yang sanggup mengabdikan dirinya kepada kepentingan perusahaan dan bisa berbahasa Belanda. Sekolah-sekolah model barat tersebut diantaranya yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Eerste Inlandsche School* (EIS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Vervolg* (Sekolah Kejuruan), *Algemeene Middelbare School* (AMS), *Hogere Burger School* (HBS), *Schakelschool* dan *Holland Inlandse Kweekschool* (HIK). Sekolah-sekolah tersebut sebagai contoh sekolah model barat yang berada di Yogyakarta. Setelah lama Pemerintah Kolonial Belanda menguasai sistem pendidikan di Indonesia, khususnya Yogyakarta di abad ke-19. Hal tersebut mendorong tokoh-tokoh politik, cendekiawan, dan pemuda di Yogyakarta berkumpul mengilhami untuk membangun sebuah lembaga perguruan tinggi milik Bangsa Indonesia. Berdirinya Universitas Gadjah Mada merupakan usaha menandingi kota-kota Kolonial, seperti Jakarta yang memiliki *Geneeskundige Hage School* (GHS) yang didirikan pada tahun 1927, *Rechts Hage School* (RHS) yang didirikan pada tahun 1924, *Faculteit der Letteren* pada tahun 1940 dan *Landbouw Hage School* pada tahun 1941.

Kata Kunci: Pendidikan Modern, Masa Kolonial, Hollandsch School.

Abstract

The happening of West influence to Indonesia specially in Yogyakarta has brought influence to Yogyakarta especially educational directly have come to impeller growing of education in the style of West in Yogyakarta in 1900-1942. In consequence, the importance explains background, growth and education impact West in Yogyakarta in 1900-1942. Research Method that used by consist of heuristic, verification or criticism, interpretation/interpretation, and historiography. Research Result mentions that background forming of modern education in the style of Dutch colonial rule for the benefit of company is forms government strategy the Netherlands in carrying out plantation, agriculture, mining. Because of government the Netherlands needs native people energys that ready to devote it to company importance and can the Netherlands. West model schools are referred as for example that is *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Eerste Inlandsche School* (EIS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Vervolg* (vocational schools), *Algemeene Middelbare School* (AMS), *Hogere Burger School* (HBS), *Schakelschool* and *Holland Inlandse Kweekschool* (HIK). Schools are conceived of west example of model school that reside in Yogyakarta. After old Dutch colonial government controls education system in Indonesia, specially Yogyakarta in 19th-century. That push political figures, intellectual, and young man in Yogyakarta gathers inspire to develop an institute of property college Indonesian nation. Forming of Gadjah Mada University is effort contests cities Colonial, like Jakarta that have *Geneeskundige Hage School* (GHS) that founded in 1927, *Rechts Hage School* (RHS) that founded in 1924, *Faculteit der Letteren* in 1940 and *Landbouw Hage School* in 1941.

Keyword: Education Modern, A period of Colonial, Hollandsch School.

PENDAHULUAN

Pendidikan Barat yang masuk di Yogyakarta merupakan sebuah dinamika yang unik di dalam lingkungannya pada saat itu. Dalam sejarahnya, Yogyakarta yang merupakan pusat dari kebudayaan Jawa serta pendidikan yang berpangkal pada tradisionalisme dalam perkembangannya telah berakulturasi dengan budaya Barat, khususnya aspek pendidikan. Keterbukaan pihak Kasultanan Yogyakarta dalam menerima pengaruh Barat khususnya pendidikan secara langsung telah menjadi pendorong berkembangnya pendidikan ala Barat di Yogyakarta.

Setelah masuknya pengaruh Barat ke Indonesia khususnya di Yogyakarta telah membawa pengaruh terhadap Yogyakarta terutama dalam bidang pendidikan. Pada mulanya sistem pendidikan yang digunakan meneruskan sistem yang digunakan zaman Mataram. Semenjak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat (Moestoko, 1979:63). Sekolah-sekolah model barat tersebut diantaranya yaitu Europeesche Lagere School (ELS), Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Eerste Inlandsche School (EIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Vervolg (Sekolah Kejuruan), Algemeene Middelbare School (AMS), Hogere Burger School (HBS), Schakelschool dan Holland Inlandse Kweekschool (HIK). Sekolah-sekolah tersebut sebagai contoh sekolah model barat yang berada di Yogyakarta.

Pada awalnya, para bangsawan adalah kelompok pertama yang mendapat akses ke pendidikan Barat. Namun, seiring berjalannya waktu rakyat biasa pun dapat mengenyam pendidikan Barat tersebut. Sebagian ada yang berterimakasih dengan memandang Belanda sebagai contoh dari semua hal modern karena telah mendirikan sejumlah sekolah bermutu tinggi sama dengan yang ada di negeri Belanda. Dipilihnya tahun 1800-1942 sebagai batasan temporal penelitian karena pada tahun tersebut pemerintah Hindia Belanda mulai menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak bangsa Indonesia khususnya keturunan priyayi. Pada masa sebelumnya pendidikan Barat telah berlangsung di Indonesia, namun awalnya hanya diperuntukkan bagi orang pribumi yang beragama Kristen serta pengetahuan umum dan kecerdasan tidak dimasukkan dalam rencana pembelajaran. Penelitian ini diakhiri pada tahun 1942, karena terjadinya perang pasifik yang mengakibatkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda melemah dan akhirnya berakhir dan diambil alih oleh pemerintah Jepang.

Terpilihnya Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah istimewa dan merupakan pusat kerajaan. Salah satu faktor yang menyebabkan Kota Yogyakarta mengalami problema pada tahun 1800-an yaitu kedatangan para kolonial Belanda yang membawa pengaruh bagi masyarakat Yogyakarta terutama dalam bidang pendidikan. Hubungan yang intens antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Kasultanan Yogyakarta menjadi pendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan Barat yang terselenggarakan di Yogyakarta.

Latar belakang penelitian ini mengacu pada tujuan pendidikan Barat yang dilaksanakan di Yogyakarta.

Masyarakat Kasultanan telah mendapatkan pendidikan Barat yang lebih modern. Namun, mereka tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan hal tersebut dengan baik dan tidak semuanya menyambut dengan baik perubahan yang diberikan dari pendidikan Barat tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Masuknya Belanda ke Indonesia untuk membentuk daerah penguasaan (koloni) serta mencakup kepentingan ekonomi dan politik. Pada awal abad 20, pemerintah Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan Barat untuk penduduk pribumi. Konsep pendidikan barat tersebut dapat lebih memenuhi kebutuhan untuk mengisi lowongan kerja dalam administrasi modern dengan gaji dan hasil yang lebih baik, maka tipe-tipe sekolah seperti ini menarik banyak murid terutama anak priyayi dan bangsawan pribumi. Sistem pendidikan Barat yang masuk menjadikan pendidikan sebagai tempat latihan bagi anak para bangsawan untuk kemudian menjadi kepanjangan dari kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda (Salim, 2007:199).

Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan kaum penjahaj. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite-sosial (penjilat penjahaj) Belanda. Dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat. Bermula dari prinsip inilah pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan pada anak-anak bangsawan bumi putera serta tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial yang diharapkan kelak mereka akan menjadi penyambung tangan-tangan penjahaj sebagai upaya Belanda untuk memerintah secara tidak langsung kepada masyarakat dan bangsa Indonesia (Ary, 1995:111).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam pelaksanaan Politik Etis, tentu tidak ada satupun yang utuh ditujukan bagi kepentingan masyarakat pribumi. Semua kebijakan yang ada tampaknya hanya dibuat demi kepentingan mereka sendiri, termasuk dalam bidang pengajaran. Pengadaan pengajaran hanya diluncurkan sekadar untuk mengikuti perkembangan perekonomian pada masa itu. Upaya perluasan dalam bidang pemerintahan dan pelayanan administrasi telah memunculkan kebutuhan akan tenaga kerja, baik dalam bidang administrasi, bidang teknik, maupun bidang kejuruan. Perkembangan pengajaran dengan sistem sekolahnya, mau tidak mau, harus disesuaikan dengan sifat dualistis masyarakat Indonesia pada masa itu. Hal ini mencakup juga pada bahasa pengantar yang digunakan maupun sistem pengajaran yang dipakai. Pada masa itu, terdapat empat kategori sekolah: (1) Sekolah Eropa, yang sepenuhnya memakai model sekolah di Negeri Belanda; (2) Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya; (3) Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah atau pribumi sebagai bahasa

pengantarnya; (4) Sekolah yang memakai sistem pribumi (Kartodirjo, 1990:76).

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda itu awalnya hanya terbatas sampai tingkat rendah. Namun, pada awal abad ke-20, mulai dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi pada tahun 1920-an. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini telah mendorong beberapa tokoh/golongan terpelajar untuk berusaha memajukan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat diskriminasi dalam pelaksanaannya, di samping sifat-sifat lembaga pendidikannya yang terlalu elite. Inilah yang menyebabkan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia berjalan dengan sangat lambat.

Ciri-ciri kebijakan pendidikan Hindia Belanda, yaitu: (1) Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia; (2) Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi; (3) Kontrol sentral yang ketat; (4) Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan; (5) Prinsip konkordansi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda; (6) Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan pribumi (Nasution, 1994:20).

Prinsip politik pendidikan yakni gradualisme, merupakan cerminan Belanda akan keengganan mereka menyediakan pendidikan bagi pribumi dan lebih suka membiarkan mereka tidak mengecap pendidikan. Keengganan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Robert van Neil, seperti dikutip Alwi Shihab dalam karyanya *Membendung Arus*, sejalan dengan keinginan mereka untuk tidak mengubah masyarakat pribumi sehingga mereka dapat lebih mudah lagi dieksploitasi (Shihab, 1998:225). Prinsip gradualisme ini menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi orang Belanda, karena pendidikan yang terlampaui banyak hanya akan membahayakan bagi pemerintah Belanda.

Selain itu, adanya dualisme pendidikan, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan Bumi Putera: (1) Sistem Konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi Bumi Putera hal ini di satu pihak memberi efek menguntungkan, sebab penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama, tetapi di pihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum Bumi Putera yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri; (2) Sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintahan kolonial Belanda; (3) Menghambat gerakan nasional; dan (4) Munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional (kemerdekaan) (Tilaar, 1995:126).

METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi/penafsiran, dan historiografi (Kasdi, 2005:10). Pertama, heuristik merupakan tahapan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mencari sumber-sumber untuk menggali informasi terkait masalah penelitian. Sumber utama dari penelitian ini adalah buku-buku yang terkait masalah pendidikan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sedangkan, sumber pendukung antara lain arsip Keraton Yogyakarta yang telah ditelusuri dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

Kedua, verifikasi atau kritik merupakan tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang didapat mengenai keaslian, turunan serta relevan tidaknya suatu sumber. Kritik bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta. Pada tahap kritik dibagi menjadi dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah pengujian terhadap isi bacaan dari suatu sumber. Kritik ekstern adalah pengujian terhadap bagian luar dari sumber yang didapat. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengkategorian terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan dan yang tidak diperlukan dalam proses penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya melakukan kritik intern, hanya menelaah atau menguji isi konten penelitian.

Ketiga, interpretasi atau penafsiran merupakan tahap penafsiran atau analisis dari pemikiran peneliti terhadap fakta tersebut. Peneliti harus dapat mengkaitkan ide yang dimiliki berdasarkan sumber-sumber yang ada sesuai kaidah dalam penelitian.

Keempat, historiografi merupakan tahap akhir dari metode penelitian yaitu penulisan suatu peristiwa sejarah berdasarkan hasil penelitian. Peristiwa sejarah yang telah terjadi dimasa lampau akan direkonstruksi kembali berdasarkan fakta yang telah ditafsirkan dan dituliskan kembali dalam bentuk penulisan sejarah secara logis dan kronologis sebagaimana dalam sistematika penulisan di bawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Belanda dalam penjajahannya di Indonesia sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan khususnya aspek pendidikan. Belanda menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan penjajah daripada rakyat jajahannya sendiri. Walaupun dalam prosesnya Belanda membuka kesempatan bagi rakyat pribumi, tujuannya yaitu membuka kelas elite dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan/kasar (Gunawan, 1995:12). Kebijakan politik pendidikan Belanda tersebut merupakan satu dari berbagai politik kolonial akan tetapi pendidikan adalah inti politik kolonial Belanda pada masa itu.

Hingga pada akhirnya pada abad ke-19 hampir tercapai taraf pendidikan universal bagi anak-anak Belanda di seluruh Indonesia (Nasution, 1994:8). Semakin bertambahnya atau meningkatnya jumlah

sekolah-sekolah bagi anak Belanda yang didirikan Kolonial Belanda sendiri semakin memperkuat bahwa mereka membentuk kaum elite. Tidak hanya mendirikan pendidikan di taraf dasar saja. Belanda juga menyelenggarakan sekolah taraf menengah.

Sekolah berbahasa Belanda dibagi dalam tiga tipe yakni sekolah untuk Belanda (ELS), Indonesia (HIS), dan Cina (HCS). Sejak 1816, HIS adalah sekolah satu-satunya di Jawa adalah sekolah untuk anak-anak Belanda. Kebijakan politik pendidikan pada masa Kolonial Belanda yang bertujuan untuk kepentingan kaum penjajah sendiri tercermin dari didirikannya pendidikan bagi anak Belanda. Dibuka di Jakarta pada tahun 1817 yang diikuti oleh pembukaan sekolah-sekolah di kota-kota lain di Jawa. Jumlahnya meningkat dari tujuh (tahun 1820), 19 (tahun 1835), 25 (tahun 1845), dan 57 (tahun 1857).

ELS menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajarnya. ELS atau Sekolah Rendah Eropa tersebut diperuntukkan bagi keturunan Eropa, keturunan timur asing atau pribumi dari tokoh terkemuka. ELS yang pertama didirikan pada tahun 1818 dengan lama sekolah 7 tahun (Nasution, 1994:66). ELS hanya terbuka bagi warga Belanda di Hindia Belanda. Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dengan lama belajar tujuh tahun, diperuntukkan bagi keturunan Indonesia asli yang umumnya anak bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Berdirinya sekolah-sekolah rendah atau Hollandsch Inlandsche school (HIS) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya (Kutoyo, 1997:112)

Hollandsch-Chineesche School (HCS) dibuka pada tahun 1908 dengan lama belajar 7 tahun. HIS dan HCS tersebut digolongkan dalam Eerste Klasse School atau Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi penduduk non Eropa khususnya, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya (Djumhur dan Danasuparta, 1974:146). Bagi masyarakat keturunan Tionghoa khususnya mereka memilih sekolah jalur HCS karena selain Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya, juga diberikan Bahasa Tionghoa sehingga memudahkan mereka dalam prosesnya.

Sekolah modern yang didirikan untuk anak Belanda mempunyai kesenjangan yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan pendidikan untuk bumiputera. Disaat statuta terbit tahun 1818 menyatakan bahwa pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi anak bumiputera. Pemerintah memberi kesempatan bagi anak bumiputera untuk mendapatkan pendidikan pada sekolah Belanda. Pasca dikeluarkan statuta tersebut, masuknya anak Indonesia ke sekolah Belanda jumlahnya sangat minoritas. Berdasarkan laporan kepala Komisi Pendidikan tahun 1847, hanya 37 anak diantara 1700 murid (Nasution, 1994:10). Dalam keadaan minoritas, masih saja ada peraturan yang mengikat untuk anak Indonesia yang menginginkan untuk masuk sekolah Belanda yang berasal dari Gubernur Jenderal kala itu. Sekolah Belanda memberikan peringatan bahwa jangan menerima anak Cina dan anak Bumiputera tanpa rundingan dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan

sebagai perlakuan Belanda untuk membatasi akses pendidikan bagi anak Bumiputera dan anak Cina.

Sekolah modern pertama di buka di Yogyakarta pada tahun 1832 oleh seorang tentara Belanda. Pendidikan modern yang diselenggarakan Belanda memang sudah lama tetapi hanya untuk anak Belanda saja, kalangan anak kaum ningrat di Indonesia hanyalah minoritas. Anggapan mereka, penyediaan sekolah bagi anak aristokrasi dan orang kaya berbeda dengan pendidikan bagi orang biasa. Hal inilah yang menjadikan ciri pendidikan di masa Kolonial Belanda saat itu.

Dalam keadaan minoritas, masih saja ada peraturan yang mengikat untuk anak Indonesia yang menginginkan untuk masuk sekolah Belanda yang berasal dari Gubernur Jenderal kala itu. Sekolah Belanda memberikan peringatan bahwa jangan menerima anak Cina dan anak Bumiputera tanpa rundingan dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai perlakuan Belanda untuk membatasi akses pendidikan bagi anak Bumiputera dan anak Cina. Pada tahun 1848 untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial diberikan sejumlah Rp 25.000,- untuk pendirian sekolah bagi anak bumiputera. Sekolah ini khususnya dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai orang bumiputera.

Sekolah taraf menengah didirikan pada tahun 1860, sekolah ini didirikan bertujuan untuk membuka kesempatan bagi anak-anak Belanda melanjutkan studinya di universitas negeri Belanda atau untuk menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan (Nasution, 1994: 10). Sesuai dengan kebijakan politik Belanda, para koloni lebih memprioritaskan pendidikan untuk orang Belanda dibandingkan dengan orang pribumi. Hanya minoritas saja penduduk pribumi yang dapat memasuki pendidikan rendah dan tidak memiliki kesempatan pendidikan lanjutan. Walaupun seperti itu, orang pribumi yang dapat masuk ke sekolah rendah khusus orang Belanda yaitu dari kalangan priayi yang kaya/bangsawan.

Salah satu faktor yang mendukung masuknya pendidikan barat di Kasultanan Yogyakarta pada saat itu adalah keluarnya Undang-Undang Agraria Tahun 1870, perusahaan perkebunan asing berkembang di Yogyakarta dan memerlukan pegawai-pegawai yang terdidik. Sebagian besar sawah dan ladang di daerah Yogyakarta disewa oleh perusahaan asing untuk perkebunan tebu dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tadi mengajukan permohonan kepada pemerintah Kasultanan dan Kadipaten Pakulaman, antara lain: (1) Agar pemerintah kasultanan mendirikan sekolah-sekolah di dalam dan di luar Kota Yogyakarta dengan pengertian bahwa segala ongkos yang harus dikeluarkan untuk keperluan sekolah-sekolah tersebut ditanggung oleh para pengusaha; (2) Pada setiap rumah tangga dalam Kota Yogyakarta dianjurkan adanya pemberian pelajaran mengenai huruf Jawa dan angka. Permohonan sekolah-sekolah yang dianjurkan oleh perusahaan asing tersebut mengadopsi sekolah Tamanan yang dulunya diprakarsai oleh Keraton Kasultanan dan Keraton Pakualaman pada zaman pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII (Sutjiatiningsih dan Kutoyo, 1981:49).

Tahun 1900, ada sebuah perkembangan aspek pendidikan di Indonesia. Ada sebuah program untuk memajukan kesejahteraan rakyat, diilhami dari ide Van Deventer. Sebuah program yang tidak dapat terwujud dengan baik apabila tidak ada usaha perbaikan dari segi pendidikan massa. Ide tersebut disebut Politik Etis yang bertujuan mencapai kesejahteraan melalui irigrasi, transmigrasi, reformasi, pendewasaan, perwakilan, dan dalam semua pendidikan memainkan peranan penting (Nasution, 1994: 15-16). Pendidikan di Indonesia harus diarahkan kepada tujuan membebaskan rakyat agar bangsanya dapat berdiri di atas kaki sendiri.

Beberapa usaha telah dilakukan oleh Belanda untuk dapat meningkatkan aspek pendidikan bagi anak-anak Indonesia, sistem pendidikan mencapai kelengkapannya, jumlah sekolah rendah meningkat cepat, jenjang pendidikan sekolah Barat hingga universitas sudah didirikan. Walaupun seperti itu kesejahteraan rakyat Indonesia tidak kunjung tiba. Hal ini dikarenakan pendidikan masih terbatas untuk golongan atas. Bagi masyarakat umumnya hanya disediakan sekolah rendah tanpa ada kelanjutannya dan tidak memiliki kedudukan yang lebih baik (Nasution, 1994: 20).

Kontrol pemerintah yang kuat dari pemerintah Belanda dalam segala masalah pendidikan yang berada di bawah kontrol Gubernur Jenderal atas nama Raja Belanda. Sampai 1918, segala masalah pendidikan diputuskan hanya oleh pegawai Belanda saja tanpa konsultasi dengan orang Indonesia. Berlangsungnya pendidikan modern dikontrol secara sentral, guru-guru dan orang tua tidak memiliki pengaruh langsung dalam politik pendidikan. Segala soal mengenai sekolah, kurikulum, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah, jenis sekolah, pengangkatan guru ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kalangan masyarakat Yogyakarta yang pada saat itu telah maju melalui pendidikan di Sekolah Modern hingga akhirnya mereka mendapat pengaruh asing yang sangat kuat. Hasilnya, mereka kurang memperhatikan kebudayaannya sendiri. Kebudayaan kaum Kolonial Belanda yang menjajali Bangsa Indonesia dalam waktu lama hampir menghancurkan kebudayaan sendiri.

Pada tahun 1900-an dalam Kota Yogyakarta ada dua sekolah asli (Tamanan dan Madyopenganti), dua sekolah Gubernur (Sri Menganti dan Pagelaran), dua sekolah partikelir di daerah Paku Alaman dan enam sekolah partikelir di daerah Kasultanan. Jadi, total keseluruhan sekolah ada 12 di daerah Yogyakarta. Sekolah Tamanan merupakan salah satu sekolah didirikan sebelum tahun 1900, tepatnya pada tahun 1757. Berdirinya Sekolah Tamanan tidak terlepas dari berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Hal ini dikarenakan sejak berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya keraton untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sekolah ini berlokasi di dalam Istana Keraton Yogyakarta.

Selain Sekolah Tamanan, juga terdapat Sekolah Madyapenganti atau disebut Sekolah Pura Paku Alaman. Pada tahun 1879 hanya terdapat satu sekolah pemerintah dan satu sekolah partikelir di daerah Pakualaman

Suromihardjo, 2000: 55). Namun akhirnya, sekolah partikelir tersebut mengalami perkembangan. Terdapat dua sekolah partikelir di daerah Pakualaman (Sekolah Suryaningjurid dan Sekolah Padmasekarnan) dan enam sekolah partikelir di Kasultanan (Mangkubumen, Suryonegaran, Yudonegara, Menduran, Jayengrat, dan Kemendaman).

Berdirinya sekolah ini dipengaruhi faktor berdirinya Pemerintah Kadipaten Paku Alaman tahun 1813. Semenjak terbentuknya pemerintah baru tersebut maka kebutuhan akan tenaga pegawai yang terdidik dirasa sangat penting. Seiring perkembangannya, sekitar tahun 1892 Legiun (tentara) dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut merupakan kebijakan KGPAA Paku Alam V yang bertujuan para putera-santana Paku Alaman dapat diterima menjadi murid sekolah-sekolah Belanda (Eerste Lagree School atau Twede Eurpeesche School) yang berkelanjutan ke sekolah HBS (Hogere Burger School) di Jakarta, dan selanjutnya ke Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Dibubarkannya Sekolah Paku Alaman selanjutnya disediakan sebuah Sekolah Partikelir yang setingkat dengan sekolah Gubernur baik di dalam maupun di luar Yogyakarta.

Pada akhir 1900 di Kota Yogyakarta hanya ada dua sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini dikenal dengan Sekolah Gubernur yang berderajat Sekolah kelas I dan kelas II. Sekolah Kelas I ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah, perdagangan, dan perusahaan dengan lama sekolah selama 5 tahun. Sekolah Kelas 2 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum dengan lama sekolah selama 3 tahun. Para murid yang berijazah tersebut boleh melanjutkan ke Sekolah Calon Guru dan Sekolah Calon Pangreh Praja dengan menempuh ujian. Gaji para guru pada kedua sekolah tersebut diterima di kantor Land Kas di Kota Yogyakarta dan segala biayanya dipikul oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Kasultanan, Yogyakarta hanya menyediakan tempat saja

Di Yogyakarta telah terdapat Sekolah Partikelir yang didirikan atas inisiatif rakyat sendiri. Berdasarkan penyelidikan, Sekolah Partikelir (Sekolah Rakyat) telah ada dan berdiri sebelum tahun 1900. Keadaan dan berdirinya sekolah-sekolah tersebut dapat diketahui dari alumnus sekolah tersebut. Sekolah Partikelir yang ada di dalam daerah Yogyakarta antara lain: (1) Sekolah Jero Gede, bertempat di sebelah Tenggara Bangsal Sewa-Taman (Pandopo Pura Paku Alaman); (2) Sekolah Padmosekarnan, bertempat di sebelah Timur Jalan Gunungketur dan masih berada dalam lingkungan rumah Ngabei Padmosekarnan

Sekolah Partikelir di luar daerah Kasultanan, antara lain: (1) Mangkubumen. Sebelum tahun 1900 Sekolah di Mangkubumen ini telah dihapus; (2) Suranegaran. Gedung sekolah ini berada pada muka sebelah timur. Sekolah ini ada di bawah pengawasan Bupati Kawedanan Ageng yang bergelar Kangjeng Raden Tumenggung Suronegoro; (3) Yudonegara. Bertempat diruangan sebelah muka pendapadan yang disebelah timur pintu (regol) dibawah pimpinan oleh Bandara yaitu pemimpin Kawedanan Ageng Reh Kori; (4) Menduran. Semula

sekolah ini ada dalam lingkungan Cepuri (halaman) Kepatihan Danurejan, dan kemudian dipindahkan ke kampung Menduran; (5) Jayengbratan. Sekolah ini ada di kampung Panembahan dan yang terletak di sebelah Timur Istana (Keraton) yaitu rumah R.M Djajengbrata; (6) Kemendaman. Gedung sekolah ini terletak di sebelah selatan Benteng Keraton dan berada di halaman Kemendaman.

Para Nayaka dan para Bupati mendirikan sekolah partikelir. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pada abad 19 di Kota Yogyakarta telah terdapat dan berdiri sekolah sekolah yang menjadi tempat dan pusat pendidikan bagi anak-anak. Walaupun demikian sekolah-sekolah tersebut jumlahnya sama sekali tidak mencukupi karena penyelenggaraan hanya sekedar dihubungkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai-pegawai pemerintah dan keraton serta perusahaan-perusahaan asing.

Sekolah Kelas II atau Ongko Loro Sejak 1901-1919 terbagi dalam 4 taraf yaitu taraf pertama 1901, taraf kedua 1903, taraf ketiga 1907, taraf keempat dan selanjutnya.

- Taraf Pertama (1901). Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda dalam daerah karesidenan Yogyakarta, mulai memperbanyak sekolah kelas dua, bagi segala lapisan rakyat dengan tidak mengingat keturunan. Hal ini dikarenakan jumlah murid pada sekolah Pagelaran selalu bertambah timbulah masalah kekurangan ruangan dan guru. Oleh karena itu, didirikanlah dua sekolah Kelas II di kampung Margoyasan dan Jetis. Gedung sekolah Kelas II yang tertua di Yogyakarta milik Pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1901 di kampung Margoyasan, sehingga sekolah itu disebut Sekolah Kelas II No. 1 Margoyasan. Gedung ini terletak di Jalan Wirogunan, sebelah utara rumah Penjara, termasuk dalam daerah Kadipaten Paku Alaman. Kepala Sekolah bernama R. Atmosudiro yang kemudian diangkat menjadi Guru Bahasa Jawa di Osvia Magelang. Penggantinya R. Suyitno Martaatmaja. Adapun Guru pembantu yaitu Somowidagdo, Sastrodikromo, dan R.M Sukardi Prawirowinarso. Kepala sekolah dan guru-gurunya pindahan dari sekolah Pagelaran. Murid-murid sekolah tersebut sebagian besar pindahan dari Pagelaran, sebagian kecil pindahan dari sekolah partikelir Jero Gede, dan lainnya dari sekolah-sekolah partikelir yang lain. Sekolah Kelas II No. 2 di Yogyakarta yaitu berada di Jetis. Secara keseluruhan Sekolah Jetis sama dengan Sekolah Margoyasan. Hal ini dikarenakan dianggap nomor dua karena Kepala sekolah dan guru pembantunya hampir seluruhnya dipindahkan dari sekolah Pagelaran. Kepala Sekolah yang pertama pada sekolah Jetis R. Darmowinoto yang sejak tahun 1912 diangkat menjadi Kepala Sekolah Kelas I di Kintelan sampai mendapat pensiun.
- Taraf Kedua 1903. Tahun 1903 Kota Yogyakarta mendapat tambahan sekolah Kelas II No. 3, No. 4, dan No 5. Tiga sekolah tersebut didirikan bersama-sama. Sekolah Kelas II No. 3 ada di kampung Ngabean, Sekolah Kelas II No. 4 dikenal Sekolah

Paku Alaman ada di gedung Sekolah Kelas II No. 1 karena Sekolah Kelas II No. 1 dipindahkan ke gedung baru. Sekolah Kelas II No. 5 ada di sebelah timur plengkung Gading, oleh karena dikenal sebagai Sekolah Gading. Berdirinya lima sekolah menyebabkan sekolah-sekolah partikelir gulung tikar karena rakyat telah mengerti bahwa sekolah kelas II milik pemerintah itu lebih sempurna penyelenggaraannya. Pada dasarnya Sekolah Kelas II No. 3, No. 4, dan No.5 merupakan sekolah rakyat yang hanya berkelas 3 saja. Para murid yang tamat pelajarannya mendapat tanda tamat belajar yang ditulis dengan huruf dan bahasa jawa. Namun pada Tahun 1906 pelajarannya ditambah satu tahun lagi, sehingga SekolahKelas II di Kota Yogyakarta seluruhnya sampai Kelas 5.

- Taraf Ketiga 1907. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII dalam daerah Karesidenan Yogyakarta mulai timbul Sekolah Kasultanan dan Sekolah Paku alaman. Sekolah ini didirikan di tiap-tiap Kawedanan dan Kapanewon di luar kota. Walaupun sekolah ini hanya sampai kelas III saja, tetapi tangga yang pertama bagi rakyat di luar kota untuk menambah ilmu pengetahuan seperti kawan-kawanannya yang ada di dalam kota. Di Kabupaten Wates, Bantul, Wonosari telah didirikan Sekolah Kelas II dengan empat kelas. Pengajaran sekolah ini merupakan pengajaran rendah maka guru-gurunya terdiri dari tamatan Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II ditambah kursus ilmu guru 6 bulan atau yang berijazah Kweeling atau yang berijazah Guru Bantu. Guru-guru tersebut mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri dan mendapat surat keterangan dari pemerintahnya masing-masing.
- Taraf Keempat dan selanjutnya. Pada Tahun 1919-1942 jumlah Sekolah Kelas II di dalam kota Yogyakarta ada 13 buah, terbesar di seluruh Kota. Tiap-tiap sekolah itu terdiri dari lima kelas. Mayoritas Kelas I dan II dua kelas (pararel), berikut ini nama dan Sekolah Ke sebagai berikut: (a) Sekolah Kelas II No. 1 di Margoyasan; (b) Sekolah Kelas II No. 2 di Jetis; (c) Sekolah Kelas II No. 3 di Ngabean; (d) Sekolah Kelas II No. 4 di Paku Alaman; (e) Sekolah Kelas II No. 5 di Gadin; (f) Sekolah Kelas II No. 6 di Sasrawijayan; (g) Sekolah Kelas II No. 7 di Tamansari; (h) Sekolah Kelas II No. 8 di Lempuyangan; (i) Sekolah Kelas II No. 9 di Kintelan; (j) Sekolah Kelas II No. 10 di Kranggan; (k) Sekolah Kelas II No. 11 di Tegalpanggung; (l) Sekolah Kelas II No. 12 di Timuran; dan (m) Sekolah Kelas II No. 13 di Panembahan.

Sekolah Rakyat yang terkenal dengan sebutan Sekolah Kelas II (Sekolah Ongko Loro) yang tersebar di seluruh kota dan rata-rata bermurid 200 orang dan terdiri dari lima kelas.

Pada tahun 1909 dikota Yogyakarta didirikan sekolah rakyat yang disebut Eerste Inlandsche School (EIS) yang dikenal sebagai Sekolah Kelas Satu. Sekolah rakyat yang berkelas enam dan mulai kelas 3 keatas sudah diberi pelajaran Bahasa Belanda. Eerste Inlandsche

School (EIS) bertempat di kampung Kintelan. Pada sekolah ini, diatas kelas tiga diberi pelajaran bahasa Belanda. Tamatan dari sekolah ini mudah diterima menjadi pegawai negeri (Kutoyo, 1997: 251). Kepala sekolahnya yang pertama bernama Raden Darmowinoto, pindahan dari Sekolah kelas II No. 2 di Jetis. Murid tamatan dari sekolah ini mudah sekali diterima menjadi pegawai negeri di berbagai kantor, begitu juga dalam dunia kerja. Mereka mendapat penghargaan lebih tinggi daripada murid tamatan Sekolah Kelas II. Dengan keadaan tersebut, maka rakyat Yogyakarta sangat terpengaruh pada pengajaran Bahasa Belanda.

Tahun 1915 lahirlah sekolah Hollandsch Inlandsche School (HIS). Sekolah ini bertempat di Jetis, saat itu merupakan Gedung SPG Negeri (yang sebelumnya merupakan Sekolah Guru Atas). Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dengan lama belajar tujuh tahun, diperuntukan bagi keturunan Indonesia asli yang umumnya anak bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Pada tahun 1915 pemerintah Hindia-Belanda memperbanyak berdirinya sekolah-sekolah rendah atau Hollandsch Inlandsche school (HIS) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya (Kutoyo, 1997: 112). Hollandsch Inlandsche School (HIS) dicapai dalam tujuh tahun. Pada Tahun 1920 di Kota Yogyakarta dibuka lagi sekolah Hollandsch Inlandsche School (HIS) untuk sementara waktu bertempat di Bintaran di belakang Gereja Katholik lalu pindah ke Pojok Beteng Wetan di Kampung Danudiningrat yang terkenal dengan nama HIS di Tungkak.

Sekolah Sri Penganti yang berderajat Eerste Inlandsche School (EIS) pada tahun 1915 menjelma menjadi Hollandsch Inlandsche School (HIS) dengan nama Keputran School dan berpindah ke gedung baru, disebelah timur Pagelaran. Dikarenakan masih terasa kurang untuk mencukupi kebutuhan rakyat.

Untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang tidak mendapat tempat di HIS atau anak-anak dari Sekolah Kelas II yang ingin belajar Bahasa Belanda ditampung oleh Neutrale Onderwijs Stachting. Lama pelajarannya 4 tahun. Sekolah ini menerima anak-anak murid kelas II yang sudah duduk di kelas 3. Jadi, jumlah pelajarannya 3 tahun ditambah 4 tahun atau 7 tahun sama dengan lama pelajaran di HIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Moestoko, Sumarsono, dkk. 1979. Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salim, Agus. 2007. Indoensia Belajarlah!: Membangun Pendidikan Indonesia. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Gunawan, Ary. 1995. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartodirjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: PT Gramedia.
- Nasution S.. 1994. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, Alwi.1998. Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Bandung: Mizan.

- Tilaar. HAR.1995. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kasdi, Aminuddin. 2005. Memahami Sejarah. Surabaya: Unesa University Press.
- Kutoyo, Sutrisno dkk. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. 1997. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Djumhur dan Danasuparta.1974. Sejarah Pendidikan. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutjiatiningsih, Sri dan Kutoyo, Sutrisno. 1981. Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Proyek Investarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suromihardjo, Abdurachman. 2000. Kota Yogyakarta: Sejarah Perkembangan Sosial 1880-1930. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Kutoyo, Sutrisno, dkk. 1997. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kutoyo, Sutrisno dkk. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. 1997. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.